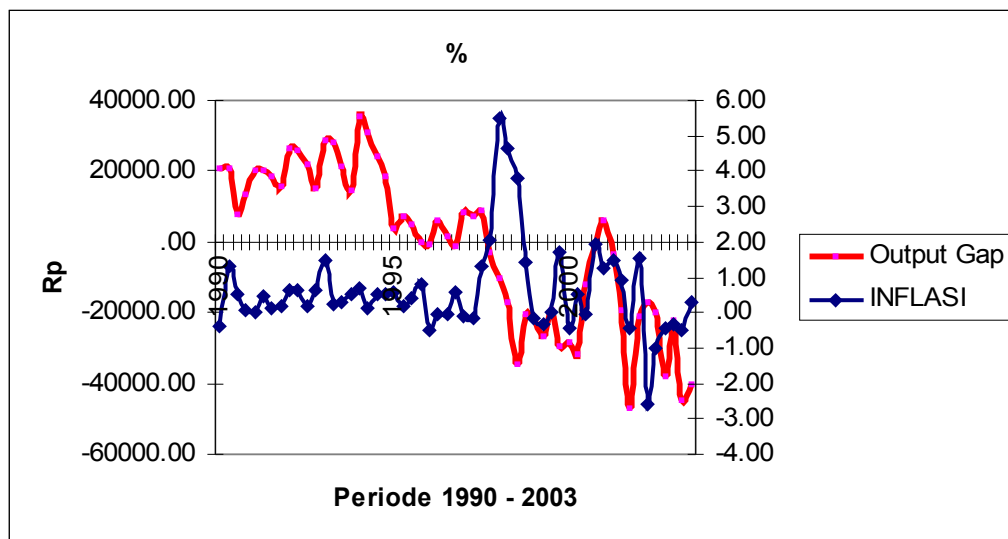


Bab 6 INFLASI

Seperti telah dijelaskan di banyak Bab sebelumnya, tiba saatnya dijelaskan secara lebih mendetail mengenai satu variabel yang memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan moneter, serta memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian negara, yakni **Inflasi**.

Pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, adalah dua syarat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa. Dengan pertumbuhan yang cukup, negara dapat melanjutkan pembangunan dan memberi pelayanan yang lebih baik bagi rakyatnya. Dengan kestabilan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pertumbuhan dan kestabilan ekonomi merupakan dua hal yang perlu diupayakan sebaik mungkin. Salah satu sumber ketidakstabilan ekonomi, yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya kenaikan harga secara umum dan terus menerus, atau lebih dikenal dengan sebutan Inflasi. Variabel ekonomi ini dapat menimbulkan ketidakstabilan produktivitas sektor riil, turunnya daya saing komoditi ekspor di pasar internasional, ketidakstabilan distribusi pendapatan masyarakat, dan masih banyak lagi variabel ekonomi lain yang terpengaruh dengan adanya inflasi ini. Oleh karena itu, melalui UU No. 23 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2004, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan berupaya mengendalikan dan mencapai target inflasi yang telah ditetapkan, sehingga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan berkelanjutan.



Gambar 6.1. Perkembangan Inflasi Dan Output Gap Nasional

Inflasi sering diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus menerus, dalam waktu dan tempat tertentu (Korteweg, 1973; Ackley, 1978; Nopirin, 1997; serta Boediono, 2001). Keberadaannya sering diartikan sebagai salah satu masalah utama dalam perekonomian negara, selain pengangguran dan ketidakseimbangan neraca pembayaran.

Namun demikian, meskipun menjadi salah satu masalah besar dalam perekonomian, sebagian ahli sepakat bahwa dampak positif inflasi akan maksimal dengan tingkat inflasi yang agak rendah, berkisar antara 5% - 6% per tahun (Glassburner, Chandra, 1981: 106). Dengan kata lain, tingkat inflasi yang kurang atau lebih dari angka tersebut, akan memiliki kecenderungan memberi dampak negatif bagi perekonomian.

Apa dampak negatif dari Inflasi ?

Pertama, Inflasi akan menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Karena dengan penghasilan yang relatif tetap, mereka tidak dapat menyesuaikan pendapatannya dengan kenaikan harga yang disebabkan karena inflasi. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki penghasilan yang dinamis (pedagang dan pengusaha misalnya), seringkali mendapat manfaat dari adanya kenaikan harga tersebut, dengan cara menyesuaikan harga jual produknya. Dengan demikian pendapatan yang mereka peroleh secara otomatis akan tersesuaikan, dan tidak jarang dengan persentase yang lebih besar. Didalam penjelasannya, Nopirin (2000: 32), menyebut dampak pertama ini dengan sebutan efek terhadap pendapatan (*Equity Effect*).

Kedua, inflasi dapat menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas, dengan kata lain nilai tukar kas tersebut menjadi lebih kecil, karena secara nominal harus menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebaliknya, mereka yang banyak memiliki kekayaan dalam bentuk aktiva tetap/aset non-likuid (golongan menengah ke atas), justru diuntungkan dengan kenaikan harga tersebut (Kesumajaya, 1993: 151). Dengan demikian inflasi akan membuat jurang kesenjangan yang semakin lebar.

Ketiga, Inflasi dapat menurunkan nilai tabungan masyarakat, sehingga masyarakat akan cenderung memilih menginvestasikan dananya dalam aktiva yang lebih baik. Dengan kecenderungan ini, dunia perbankan akan mengalami kesulitan likuiditas, dan sebagai salah satu sumber perolehan dana bagi sektor riil, hal ini tentu tidak menguntungkan.

Keempat, Inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat. Sebagai contoh, di sektor perdagangan luar negeri, komoditi ekspor Indonesia menjadi kurang dapat bersaing dengan komoditi sejenis di pasar dunia. Dengan kata lain, kemerosotan produksi akan terjadi, baik untuk produk yang berorientasi ekspor maupun produk untuk pasar domestik.

Hal ini sangat berbahaya karena dapat memicu meningkatnya pengangguran di suatu negara (Khalwaty, 2000: 33), dan juga (Korteweg, 1973).

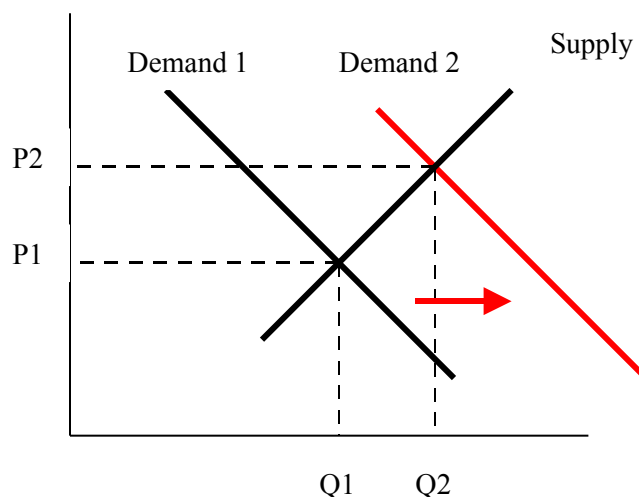
Di sisi kurs valuta asing, Rupiah akan semakin terdepresiasi terhadap mata uang asing, yang pada gilirannya akan menimbulkan masalah lain yang tidak kalah seriusnya, seperti membengkaknya kewajiban Pemerintah terhadap kreditur luar negeri. Menurut Harvey (1988: 354) inflasi akan mempengaruhi kinerja perdagangan suatu negara yang tercermin dalam neraca perdagangannya. Terakhir, inflasi yang tidak terkendali dapat mendorong terjadinya *capital outflow* ke luar negeri. Pemilik modal akan lebih memilih menginvestasikan dananya di negara yang lebih menguntungkan. Begitu pula akan terjadi relokasi sektor manufaktur / riil ke negara yang memiliki *cost production* yang lebih rendah.

Apa Yang menyebabkan terjadinya Inflasi ?

Secara teori, timbulnya inflasi dapat dikarenakan oleh beberapa hal. Menurut Soediyono (2000: 179), dari sebab-musababnya inflasi dapat timbul karena adanya peningkatan permintaan masyarakat (*demand pull inflation*), karena desakan naiknya biaya produksi (*cost push inflation*), serta karena keduanya (*mixed inflation*).

Demand Pull Inflation

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana inflasi terjadi akibat dari dorongan peningkatan permintaan ini, dapat diperhatikan gambar berikut :



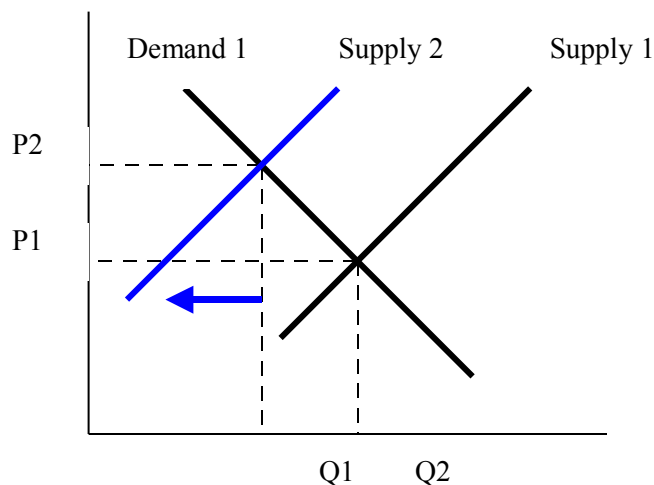
Gambar 6.2. Proses Terjadinya Kenaikan Harga (Inflasi) karena *Demand Pull*

Dalam gambar tersebut di atas terlihat bahwa, seperti telah sering dijelaskan karena JUB meningkat, permintaan masyarakat untuk berkonsumsi akan cenderung

meningkat, dan peningkatan ini akan menggeser kurva permintaan ke kanan (Demand 2), sehingga meskipun produksi dan permintaan naik dari Q1 ke Q2, namun harga akan naik dari P1 ke P2, sehingga bila ini terjadi pada semua barang akan menimbulkan inflasi.

Cost Push Inflation

Sementara itu, proses terjadinya inflasi karena dorongan biaya produksi, dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar berikut ini.



Gambar 6.3. Proses Terjadinya Kenaikan Harga (Inflasi) karena Cost Push

Dari gambar di atas terlihat bahwa, kenaikan harga (dari P1 ke P2) terjadi akibat meningkatnya biaya produksi, yang mendorong produsen untuk mengurangi jumlah produksinya (garis Supply 1 bergeser ke kiri menuju Supply 2), akibatnya jumlah produksi berkurang dan harga naik dari P1 ke P2.

Bila diperhatikan, dampak dari kenaikan harga ini lebih buruk dari proses yang karena *Demand Pull*, karena selain kenaikan harga, jumlah produksi juga berkurang, sehingga selain harus menanggung kenaikan harga, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan produk.

Dengan pendapat yang sedikit berbeda, Nopirin (1997) berpendapat bahwa karena inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum, dimana harga umum ditentukan oleh permintaan dan penawaran agregat, maka inflasi dapat disebabkan oleh perubahan permintaan dan atau penawaran agregat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui dua variabel tersebut. Sementara itu, menurut Boediono (2001) dilihat dari asalnya, inflasi dapat timbul dari aktivitas ekonomi dalam negeri (*domestic inflation*) dan dapat pula karena pengaruh komoditi impor (*Imported Inflation*).

Dengan semakin terbukanya perekonomian Indonesia, pengaruh komoditi impor bagi laju inflasi akan semakin besar. Dengan kata lain, inflasi di Indonesia yang pada awalnya bersifat '*monetaris*' akan menjadi '*imported inflation*', dan hal ini perlu menjadi bahan pemikiran selanjutnya (Permono, 1995).

Meskipun secara umum telah dijelaskan di beberapa Bab sebelumnya, berikut akan dijelaskan secara lebih detail mengenai terjadinya inflasi. Beberapa model yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya inflasi antara lain adalah :

- Model Keynesian
- Model Ekspektasi
- Model Monetaris
- Model Kepemimpinan-Gaji
- Model Strukturalis, dan
- Model NeoStrukturalis

Empat model yang disebutkan pertama, banyak digunakan untuk meneliti masalah inflasi di negara-negara maju, sementara dua model terakhir banyak digunakan untuk meneliti masalah inflasi di negara berkembang, sedangkan model monetaris banyak digunakan baik di negara maju maupun berkembang.

Model Keynesian

Model ini tampaknya lebih menitik beratkan penyebab terjadinya inflasi dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*), dengan pemikiran dasar bahwa inflasi terjadi karena terjadi eksese permintaan. Hal ini dapat terjadi karena permintaan yang bertambah, sementara jumlah produksi (dan tentu saja kesempatan kerja) relatif tetap, atau berjalan lebih lambat, akibatnya sisi penawaran tidak mampu mengimbangi permintaan yang ada, sehingga garis permintaan bergeser ke atas dan harga naik.

Model Ekspektasi

Di dalam meneliti masalah inflasi model ini menggunakan asumsi dasar bahwa masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya memiliki perkiraan, harapan, dan dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan harga dengan bertindak secara rasional. Masyarakat akan menggunakan seluruh informasi yang berkaitan dengan masalah kenaikan harga untuk bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan ekonominya.

Model Monetaris

Seperti halnya model Keynesian, model Monetaris ini juga melihat penyebab inflasi dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*), namun penyebab utama eksese permintaan adalah adanya uang beredar dalam arti sempit (M1). Seperti diketahui

bahwa meningkatnya uang beredar akan meningkatkan permintaan agregat, yang apabila tidak diimbangi dengan tersedianya produksi yang memadai akan menimbulkan *ekses demand* yang berarti terjadi kenaikan harga.

Model Kepemimpinan-Gaji

Apabila model Keynesian dan Moneteris lebih melihat penyebab kenaikan harga dari sisi permintaan, maka model ini mempercayai bahwa penyebab kenaikan harga adalah terjadinya kenaikan gaji (tuntutan dari serikat buruh atau peraturan Pemerintah) pada industri-industri yang utama, yang kemudian diikuti oleh industri-industri lainnya. Kenaikan gaji ini tentu saja akan berdampak pada meningkatnya ongkos produksi, bila industri tersebut tidak dapat melakukan efisiensi di pos biaya produksi lainnya, sehingga harga produk akan naik (*cost-push inflation*).

Model Strukturalis

Seperti halnya model sebelumnya, model ini percaya bahwa penyebab inflasi adalah dari sisi penawaran (*cost-push inflation*) di samping tentu saja masalah struktural (lihat juga Fischer, Mayer, 1981, Cavanese, 1982,). Masalah struktural timbul terutama di negara yang ketergantungan pada produk makanan misalnya, masih tinggi (contoh Indonesia), di sisi lain pertumbuhan ekonomi (dan kesempatan kerja) di sektor lain cukup tinggi. Masalah terjadi apabila ada ketimbangan antara jumlah produksi sektor pertanian tidak dapat mengimbangi permintaan pangan dari sektor lainnya. sehingga menyebabkan harga pangan naik. Kenaikan kebutuhan pokok ini dapat mendorong tuntutan kenaikan upah yang tentu saja dapat berakibat naiknya biaya produksi (*cost-push inflation*). Selain itu, model ini juga melihat ketegantungan industri pada bahan-bahan baku dan penolong impor juga dapat memicu tingginya biaya produksi.

Menurut model ini, berkurangnya cadangan devisa juga dapat menjadi pemicu terjadinya kenaikan harga, apabila dengan cadangan devisa yang kecil, kemampuan impor kebutuhan bahan baku menjadi berkurang, sehingga produksi berjalan lambat, sementara permintaan tetap atau bahkan bertambah.

Model Neostrukturalis

Ada kaitannya dengan model Moneteris, model ini juga sepakat bahwa jumlah uang menjadi faktor penting penentu besaran inflasi. Hanya saja menurut model ini, pengaruh tersebut melalui proses sebagai berikut: Banyaknya uang yang tersedia untuk investasi akan menyebabkan harga uang tersebut, yaitu tingkat bunga menjadi rendah. Rendahnya tingkat bunga akan mendorong meningkatnya volume investasi, sehingga nilai produksi akan meningkat, dan tentu saja harga akan lebih rendah (inflasi rendah), begitu pula sebaliknya

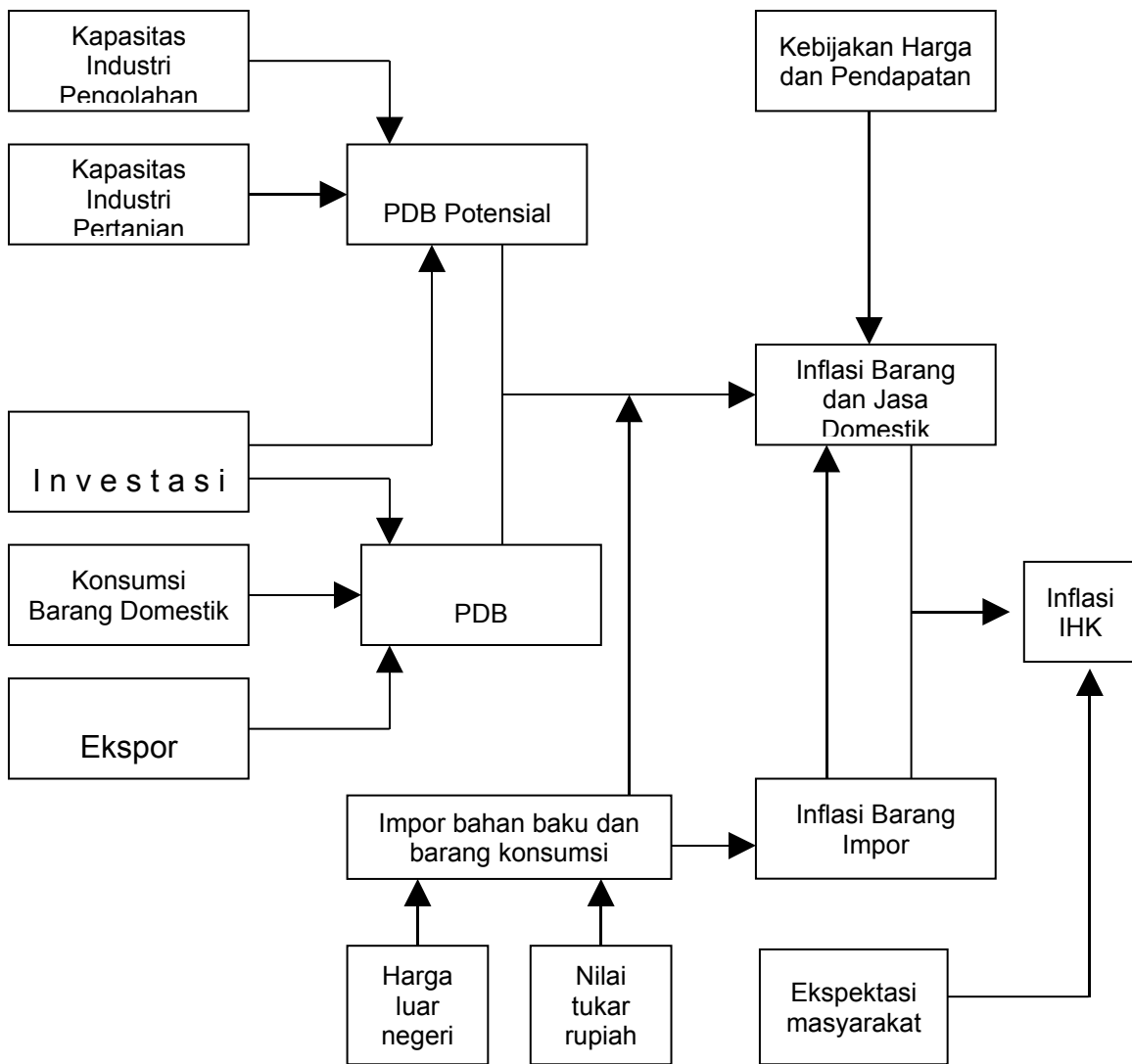
Model Bank Indonesia

Bank Indonesia, sebagai salah satu institusi negara yang memiliki otoritas untuk melaksanakan kebijakan moneter, berada dalam posisi yang dilematis. Kebijakan moneter kontraktif memang dapat dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi, namun kebijakan ini memiliki konsekuensi naiknya suku bunga. Bagi perekonomian Indonesia yang saat ini masih rentan dan rawan krisis, hal ini tentu tidak menguntungkan karena akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, Bank Indonesia diharapkan melakukan kebijakan moneter ekspansif untuk lebih mendorong pertumbuhan, namun dengan kebijakan ini, target inflasi akan terlampaui. Dilema yang dihadapi BI ini cukup beralasan karena studi empiris juga telah membuktikan demikian, paling tidak seperti yang ditemukan oleh Fischer (1983: 35), Grier, Tullock (1989: 25), Cardoso, Fishlow (1991: 42), Cukierman, dkk (1993: 25), Gregorio (1993: 20), serta Barro (1997: 14).

Oleh karena itu, dengan dilema tersebut di atas, sebagai institusi moneter tertinggi di Indonesia BI telah memiliki berbagai formula untuk mendapatkan dampak yang paling baik bagi kestabilan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Secara matematis peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan formulasi perubahan tingkat inflasi di Indonesia yang dibuat oleh Bank Indonesia, namun secara grafis, model yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:



Sumber : Bank Indonesia, 2001

Gambar 3.1. Model Analisis Tingkat Inflasi BI

Melihat dari berbagai model yang pernah ada tersebut peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, dari beberapa model penelitian di atas, variabel ekspektasi masyarakat belum dimasukkan sebagai salah satu variabel penentu tingkat inflasi, sementara perkembangan saat ini, termasuk model yang ada di Bank Indonesia sudah memasukkan ekspektasi masyarakat sebagai salah satu variabel yang diyakini memiliki potensi kuat dalam mempengaruhi perilaku inflasi di Indonesia. *Kedua*, sebagian besar model lebih banyak menggunakan variabel ekonomi makro yang terukur saja, sementara perkembangan analisis mulai mengarah pada variabel-variabel yang bersifat sosial-politik, seperti gejolak masyarakat, kredibilitas Pemerintahan, kestabilan politik, dan sejenisnya. *Ketiga*, hampir semua penelitian tersebut dilakukan dengan periode data yang kurang

mencerminkan adanya goncangan ekonomi seperti terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997.

Model ABS (2004)

Model Inflasi ini dikembangkan oleh seorang mahasiswa ekonomi dari Universitas Gunadarma Indonesia bernama AB Setyawan, dengan tujuan khusus menganalisis perilaku Inflasi di Indonesia, dengan menggunakan periode pengamatan tahun 1990:1 sampai dengan tahun 2003:3. Dengan berbagai analisis yang telah dilakukan, model perilaku Inflasi yang diperoleh adalah :

$$\begin{aligned} \Delta P &= -2,870 - 2,994e-08 \mathbf{NT}^2 + 1,534e-12 \mathbf{NT}^3 + 1,011e-05 \mathbf{JUB} + 0,746 \mathbf{Ia} \\ &\quad (-4,288) \quad (-2,615) \quad (2,508) \quad (3,192) \quad (3,079) \\ &\quad - 9,361e-02 \mathbf{Ia}^2 + 4,326e-02 \mathbf{Ij}^2 + 1,637 \mathbf{Expt} + 2,226e-02 \mathbf{Expt}^3 + 0,152 \mathbf{r} \\ &\quad (-2,693) \quad (2,191) \quad (14,441) \quad (2,372) \quad (2,609) \\ &\quad - 6,984e-03 \mathbf{r}^2 + 6,683e-05 \mathbf{r}^3 \\ &\quad (-3,577) \quad (2,997) \quad (5.3) \end{aligned}$$

$$R^2 = 0,957 ; F = 86,182 \text{ dengan } DW = 1,836$$

Terlihat pada model persamaan 5.3. di atas bahwa variabel yang membentuk model dengan *goodness-of-fit* dan signifikansi yang baik adalah variabel Nilai tukar (**NT**), variabel Jumlah Uang Beredar (**JUB**), variabel Inflasi Amerika (**Ia**), variabel Inflasi Jepang (**Ij**), variabel Ekspektasi masyarakat (**Expt**), serta variabel tingkat bunga (**r**).

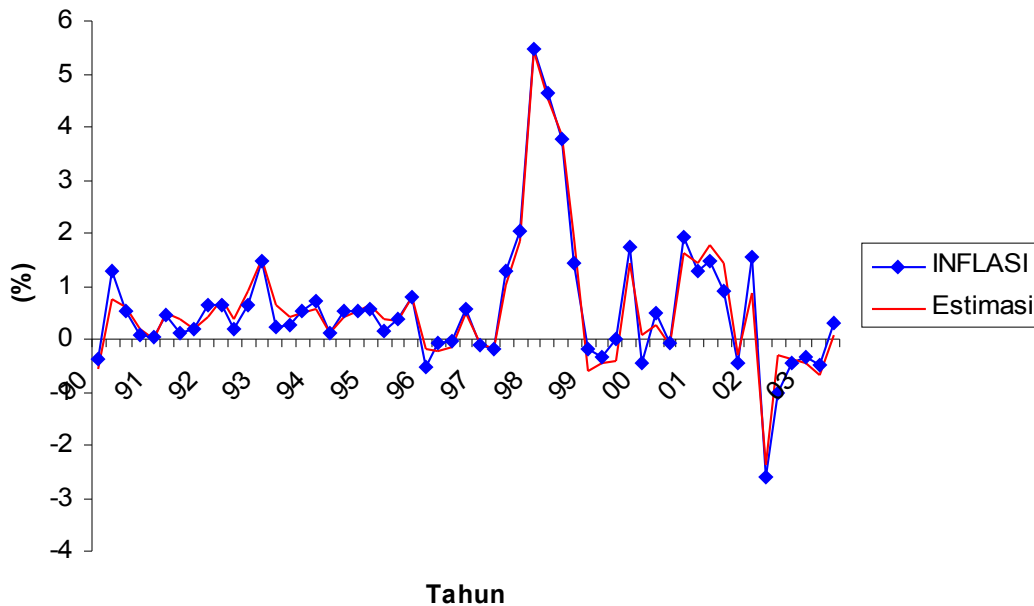
Dari nilai koefisien yang ada pada model persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Setiap kenaikan Rp 1,- pada nilai tukar Rupiah terhadap Dolar, maka inflasi akan mengalami penurunan sebesar $-2,994e-08 + 1,534e-12 = -2,994e-08\%$
- Perubahan Jumlah uang beredar senilai Rp 1 miliar, akan menyebabkan perubahan inflasi sebesar $1,011e-05\%$
- Perubahan besaran inflasi di Amerika sebesar 1% akan menyebabkan inflasi di Indonesia berubah sebesar $0,746 - 0,09361 = 0,6524 \%$
- Begitu pula apabila terjadi perubahan besaran inflasi di Jepang sebesar 1%, maka inflasi di Indonesia akan berubah sebesar $0,04326 \%$
- Sementara itu setiap perubahan 1% ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di kemudian hari akan mengakibatkan perubahan inflasi sebesar $1,637\% + 0,02226\% = 1,65926 \%$

- Selanjutnya perubahan tingkat bunga sebesar 1% akan menyebabkan inflasi di Indonesia berubah sebesar $0,152 - 0,006984 + 6,683e-05 = 0,1451\%$

Bagaimana keakuratan model ABS tersebut dalam memprediksi perilaku Inflasi di Indonesia ?

Secara umum model ABS cukup efektif didalam memprediksi perilaku Inflasi di Indonesia, seperti terlihat pada gambar berikut ini :



Grafik 5.1. Nilai Aktual dan Estimasi Inflasi di Indonesia dengan Model ABS Periode 1990 - 2003

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa secara garis besar, hasil estimasi model yang dihasilkan dari model ABS dapat digunakan untuk melakukan analisis perubahan tingkat inflasi di Indonesia, karena secara keseluruhan hasil estimasi dari model dapat mengikuti dan searah dengan pola pergerakan perubahan tingkat inflasi aktualnya.

Tabel 5.8.
Ringkasan Hasil Analisis Pengaruh Jangka Pendek dan Jangka Panjang Variabel Independen Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia

No.	Variabel independen	Pengaruh Jangka Pendek	Pengaruh Jangka Panjang
1	Output Gap	Tidak	Tidak
2	Jumlah Uang Beredar	Ya	Ya
3	Ekspektasi Masyarakat	Ya	Ya
4	Tingkat bunga	Ya	Ya
5	Stabilitas Politik	Tidak	Ya
6	Nilai Tukar	Ya	Ya
7	Inflasi Jepang	Ya	Ya
8	Inflasi Amerika	Ya	Ya

Sementara itu, beberapa model yang juga mencoba menjelaskan nilai Inflasi di Indonesia antara lain adalah :

a. Model Iswardono (1980)

Iswardono menggunakan model ini untuk meneliti perubahan tingkat inflasi di Indonesia untuk periode 1960-1979, dengan hasil:

$$\text{CPI} = 35,68 + 1,25 \Delta M + 0,81 \Delta S + 0,14 \Delta P_m$$

(6,98) (0,79) (0,80)

$R^2 = 0,98$; $F = 328,72$ dan $DW = 1,47$

Dimana :

CPI : Indek Harga Konsumen

ΔM : Perubahan JUB

ΔS : Perubahan Penawaran Domestik

ΔP_m : Perubahan tingkat inflasi di Pasar Dunia

b. Model Tadjudin Parenta (1983)

Tadjudin meneliti perubahan tingkat inflasi di Indonesia dengan menggunakan data tahun 1960 – 1980, dengan hasil:

$$P = 5,573 + 1,448 M - 5,773 Y + 0,08 PI$$

(8,455) (-2,018) (0,375)

$$R^2 = 0,983 ; F = 212,02 \text{ dan } DW = 2,780$$

Dimana :

- P : Perubahan tingkat inflasi (COL) dalam %
- M : Perubahan JUB dalam %
- Y : Perubahan Penawaran Domestik
- PI : Perubahan tingkat inflasi barang Impor (Rupiah)

c. Model Budi Gadjah (1985)

Data yang dipergunakan dalam model ini adalah data tahun 1969/70 – 1981/82 dengan hasil sebagai berikut:

$$Y = -6,47 + 1,006X_1 - 0,06X_2 + 0,64X_3 - 1,12X_4 + 0,26X_5 - 0,03X_6 - 0,64X_7$$

(-0,08) (2,72) (-0,69) (4,24) (-3,17) (2,38) (-1,83)

$$- 0,027X_8 + 0,56X_9 - 0,10X_{10}$$

(-1,35) (2,32) (-0,79)

$$R^2 = 0,79 ; F = 7,486 \text{ dan } DW = 2,71$$

Dimana :

- Y : Perubahan tingkat inflasi (COL)
- X₁ : Perubahan JUB
- X₂ : Perubahan tingkat inflasi Valuta Asing
- X₃ : Perubahan Export dengan Minyak
- X₄ : Perubahan Pajak Langsung
- X₅ : Perubahan Pajak Tidak Langsung
- X₆ : Perubahan Penerimaan Bukan Pajak
- X₇ : Perubahan Bantuan Luar Negeri
- X₈ : Perubahan Pembayaran Hutang
- X₉ : Perubahan Belanja Pegawai
- X₁₀: Perubahan Belanja Barang

d. Model Heru Priyadi (1986)

Model ini digunakan untuk meneliti perubahan tingkat inflasi di Indonesia dengan data tahun 1969/70 – 1983/84 dengan hasil:

$$Y = -18,61 + 0,38X_1 + 1,12X_2 + 0,41X_3 + 0,024X_4$$

(2,074) (1,94) (2,93) (0,260)

$$R^2 = 0,84 ; F = 5,57 \text{ dan } DW = 1,06$$

Dimana :

- Y : Perubahan IHK dalam %
- X₁ : Perubahan JUB dalam %
- X₂ : Perubahan Worked Price dalam %
- X₃ : Perubahan penerimaan Pemerintah dan Pajak Tidak Langsung dalam %
- X₄ : Perubahan Pengeluaran Pemerintah

Bagaimana Menghitung Inflasi di Indonesia ?

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya inflasi adalah :

- a. Indeks Biaya Hidup (*Cost of Living*)
- b. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Prices Index*)
- c. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto (*GDP Deflator*)
- d. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Whole Sale Prices Index*)

Di Indonesia, formulasi untuk mendapatkan nilai Indeks Harga Konsumen telah ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dengan menggunakan rumusan Laspeyres yang dimodifikasi, yaitu :

$$IHK_n = \frac{\sum P_n \cdot P_{n-1} \cdot Q_0}{\sum P_0 \cdot Q_0}$$

dimana :

- IHK_n : IHK bulan ke-n
- P_n : Harga pada bulan ke-n
- P_{n-1} : Nilai konsumsi pada bulan ke n – 1
- P₀ . Q₀: Nilai konsumsi pada tahun dasar

Setelah nilai IHK diketahui, maka laju inflasi dapat dicari dengan rumusan :

$$I_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}}$$

Dimana :

I_t = Tingkat Inflasi pada periode t
 IHK_t = Indek Harga Konsumen Pada Periode t
 IHK_{t-1} = Indek Harga Konsumen Pada periode t-1

Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) keempat tahun 1996, sejak tahun 1997 perhitungan inflasi didasarkan pada 400 jenis komoditi yang dihitung di 44 kota di Indonesia. Sebagai informasi, Survei Biaya Hidup pernah dilakukan di Indonesia, pada tahun 1958, 1978, serta tahun 1988. Untuk selanjutnya SBH akan dilakukan sekitar 7 tahun sekali sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Khalwaty, 2000 : 47 - 51).